

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah RKPD Perubahan Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021, RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 dengan tetap memperhatikan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 dan semester pertama tahun 2017. Prioritas pembangunan daerah merupakan arahan bagi OPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2017, dan berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2015-2019. RPJMN Tahun 2015 – 2019 berisikan agenda prioritas dan program Nawa Cita yang salah satu sasaran pokoknya yaitu pembangunan kelautan dengan fokus pemanfaatan sumberdaya kelautan untuk pembangunan ekonomi nasional melalui peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya serta peningkatan pelayanan angkutan laut. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan pemanfaatan sumber daya alam laut dan meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya hayati laut melalui peningkatan luas kawasan konservasi laut dan peningkatan cakupan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan.

Adapun tema RKPD Tahun 2017 adalah : ***“Akselerasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik demi Mewujudkan Masyarakat Maritim yang Sejahtera Menuju Daya Saing Daerah”***.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah dalam RPJPD Tahun 2005 – 2025 yaitu ***“Selayar sebagai Kabupaten Maritim, Terdepan, Mapan, Mandiri dan Berkelanjutan”***, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016 – 2021 yaitu ***“Mewujudkan Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”***.

Misi Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005 – 2025 antara lain:

1. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya kemaritiman;
2. meningkatkan kualitas SDM;
3. mendorong terwujudnya daya saing dan kemandirian daerah; dan
4. melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Sementara itu, prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 adalah :

4.1.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2016
Misi 1 : Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama				
1.	Meningkatkan kualitas ke-hidupan religius masyarakat dan kerukunan intra dan antar umat beragama	Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengalaman agama (1)	Penguatan kerjasama pemerintah dan toko agama dalam pemeliharaan situasi kondusif bagi kehidupan beragama	Akselarasi pemantapan kehidupan beragama
		Terpeliharanya kerukunan intra dan antar ummat beragama (2)		
Misi 2 : Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian ekosistem				
1.	Meningkatkan kualitas ke-makmuran ekonomi	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan holtikultura, peternkan, perkebunan dan perikanan (3)	Penguatan dukungan keterampilan saranaproduksi tanaman pangan dan holtikultura, peternkan, perkebunan dan perikanan	Akselerasi pengembangan ekonomi kerakyatan

2.	Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi	Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah (4)	Penguatan kapasitas teknologi dan manajerial industri yang sudah ada dan inisiasi industri baru	Akselerasi pengembangan ekonomi kerakyatan
		Meningkatnya kualitas dan peran koperasi dan UMKM (5)	Penguatan dukungan permodalan dan manajemen koperasi dan UKM disertai dan daya saing pasar	Akselerasi pengembangan ekonomi kerakyatan
		Berkembangnya daya saing pariwisata daerah (6)	Peningkatan kualitas daya tarik wisata dan pengembangan destinasi wisata unggulan baru.	Akselerasi pengembangan ekonomi kerakyatan
		Tekendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung sulawesi selatan sebagai lumbung pangan nasional (7)	Pengendalian kompresensi lahan pertanian pangan secara komplementer dengan optimalisasi lahan pangan pangan dan pencetakan lahan pangan baru	Akselerasi pengembangan ekonomi kerakyatan
		Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (8)	Penguatan akses informasi pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian, perikanan dan kehutanan berbasis koordinasi kelembagaan penyuluhan level provinsi dan kab.kota	Akselerasi pengembangan ekonomi kerakyatan

		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (9)	Peningkatan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi pangan dan keamanan pangan	Akselerasi pengembangan ekonomi kerakyatan
3.	Meningkatkan kualitas ke-sejahteraan sosial	Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota (10)	Pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan orang miskin	Akselerasi pembinaan dan pengentasan masyarakat tidak mampu
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial	Peningkatan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan PMKS	
4.	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam	<p>Meningkatnya perlindungan fungsi lingkungan hidup dan penanganan dampak lingkungan hidup (12)</p> <p>Meningkatnya konservasi rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta pemeliharaan keanekaragaman hayati (13)</p>	<p>Peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan hidup secara beriringan dengan penanganan dampak lingkungan hidup.</p> <p>Peningkatan keterlibatan multi pihak dalam gerakan penanganan lahan kritis dan pelestarian sumber daya hayati.</p>	Akselerasi peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan

<p style="text-align: center;">Misi 3 : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur</p>				
5.	Meningkatkan akses kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatkan kemampuan literansi dan minat baca masyarakat (14)	Penuntasan buta huruf secara terpadu berbasis desa seiring dengan pengembangan minat baca	Akselerasi pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan
		Meningkatkan akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun (15)	Peningkatan efektifitas dukungan pembiayaan pendidikan melalui pendidikan gratis	Akselerasi pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan, keolahragaan
		Berkembangnya pendidikan tinggi (16)	Dukungan pembiayaan mahasiswa tahun pertama	Akselerasi pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan
		Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman (17)	Revitalisasi dan pengembangan kekayaan budaya secara adaptif-kreatif terhadap perubahan global	Akselerasi pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan
		Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan (18)	Pengembangan prestasi pemuda dan keolahragaan termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung	Akselerasi pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan

6.	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Berkembangnya layanan rumah sakit bertaraf internasional (19)	Kerja sama pihak swasta dan fasilitas kabupaten dalam mendorong peningkatan kualifikasi rumah sakit	Akselerasi pembangunan bidang kesehatan
		Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat (20)	Mendorong keikut sertaan masyarakat dalam sistem penjaminan kesehatan nasional	Akselerasi pembangunan bidang kesehatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi (21)	Penanganan komprehensif usia 1.000 hari pertama kelahiran	Akselerasi pembangunan bidang kesehatan
		Meningkatnya pola hidup sehat, Keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan. (22)	Penanaman nilai dan norma pola hidup sehat serta pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan	Akselerasi pembangunan bidang kesehatan
		Terkendalnya pertumbuhan penduduk (23)	Peningkatan wawasan pembangunan berbasis kependudukan	Akselerasi pembangunan bidang kesehatan
7.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur	Meningkatnya kapasitas jalan guna mendukung sulawesi selatan sebagai simpul transportasi luar jawa (24)	Pemeliharaan dan peningkatan Kapasitas Jalan berbasis simpul jaringan intra dan ekstra sulawesi selatan termasuk pengembangan kawasan strategis	Akselerasi peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah

		Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang mampu menunjang sulawesi selatan sebagai simpul transportasi luar jawa (25)	Pengembangan prasaran transportasi massal, perkereta apian lintas sulawesi dan transportasi darat, transportasi udara dan transportasi lau dalam kerangka sulawesi selatan hub perhubungan sulawesi dan kawasan timur indonesia.	Akselerasi peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah
		Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang sulawesi selatan sebagai simpul komunikasi dan informasi luar jawa (26)	Mendorong kota makssar sebagai sentra peyediaan dan jaringan kominikasi bagi perusahaan komunikasi	Akselerasi peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah
		Meningkatnya keterpenuhan kebutuhan akan rumah layak huni (khususnya rumah tangga miskin) dan infrastruktur pemukiman yang berkualitas (27)	Dukungan pemenuhan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin dan infastruktur pulau kecil.	Akselerasi peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah
		Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi dan rawa pemanfaatan air tanah (28)	Keterpaduan hulu dan hilir dalam pengelolaan sumber daya air serta peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi	Akselerasi peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah

		Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan sumber daya mineral untuk mendukung peningkatan perekonomian wilayah (29)	Pengembangan sumber-sumber energi alternatif terbarukan dan optimalisasi pengelolaan sumber daya mineral	Akselerasi peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah
		Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/masyarakat pulau-pulau kecil (30)	Kordinasi lintas sektor dan daerah dalam pemenuhan infrastruktur dasar dan layanan dasar pulau-pulau kecil terluar	Akselerasi peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah
		Tersedianya infrastruktur dan kesiapan penanganan bencana (31)	Pengembangan daya resiliensi masyarakat atas bencana secara beriring dengan peningkatan koordinasi pemerintah dan lembaga lain dalam penanganan bencana	Akselerasi peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah
<p style="text-align: center;">Misi 4 : Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global</p>				
8.	Meningkatkan daya saing daerah	Terjaganya iklim investasi Ber-kualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jaringan ekonomi dan jasa luar Jawa (32)	Pengembangan kerja sama Pembangunan dan penguatan daya saing daerah	Akselerasi pengembangan kerja sama dan daya saing daerah

		Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung sulawesi selatan sebagai simpul jaringan ekonomi dan jasa luar jawa (33)	Peningkatan kompetensi tenaga kerja pada level yang dapat bersaing pada tingkat internasional	Akselerasi pengembangan kerja sama dan daya saing daerah
		Berkembangnya sistem Inovasi daerah (SIDA) yang mendukung sulawesi selatan sebagai simpul jaringan ekonomi dan jasa luar jawa (34)	Membangun sinergitas penelitian dan pengembangan antar lembaga penelitian, perguruan tinggi , pemerintah daerah dan dunia usaha	Akselerasi pengembangan kerja sama dan daya saing daerah
9.	Meningkatkan kerja sama antar kabupaten/kota serta sinergitas nasional dan global	Efektifnya peran sulawesi selatan dalam mendorong kerja sama antar kabupaten/ kota, klaster MP3E1, kerja sama regional sulawesi dan kawasan timur Indonesia, dan kerja sama Internasional (35)	Pengembangan simpul sinergi antar pihak dan antar wilayah secara multi-level provinsi, nasional dan global	Akselerasi pengembangan kerja sama dan daya saing daerah
		Meningkatnya percepatan Pembangunan kawasan andalan (36)	Peningkatan kualitas Interkoneksitas fungsional antar kawasan baik secara forward linkage maupun backward linkage	Akselerasi pengembangan kerja sama dan daya saing daerah

<p style="text-align: center;">Misi 5 : Meningkatkan kualitas demokrasi dan kapasitas hukum</p>				
10.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan demokrasi dan penegakan hukum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial (37)	Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait secara vertikal dan horizontal seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat atas hukum dan norma sosial	Akselerasi pemeliharaan ketertiban dan pencapaian demokrasi
		Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik (38)	Meningkatkan pembinaan partai politik serta penguatan civil society bagi perkembangan keadaan kondusif atas kehidupan demokrasi yang lebih subjektif	Akselerasi pemeliharaan ketertiban dan pencapaian demokrasi
11.	Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (39)	Memperkuat keberdayaan perempuan di sektor publik dan privat secara terkordinasikan dengan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan	Akselerasi pemeliharaan ketertiban dan pencapaian demokrasi

Misi 6 : Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa				
12.	Memelihara ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat	Terpeliharanya ketertiban, ketentraman dan kenyamanan dalam masyarakat (40)	Memperkuat sistem terpadu pengembangan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan.	Akselerasi pemeliharaan ketertiban dan pencapaian demokrasi
13.	Memelihara harmoni sosial dan kesatuan bangsa	Berkembangnya wawasan, kesadaran dan perilaku masyarakat yang mendukung ke-satuan bangsa harmoni sosial dalam wadah NKRI (41)	Meningkatkan kualitas modal sosial sebagai basis harmoni sosial dan kesatuan bangsa	Akselerasi pemeliharaan ketertiban dan pencapaian demokrasi
Misi 7 : Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih				
14.	Mewujudkan pemerintahan yang baik	Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat, dan transparan dalam mendukung repormasi birokrasi (42)	Penataan dan penguatan organisasi dan manajemen SDM aparatur serta penyempurnaan sistem pelayanan	Akselerasi reformasi birokrasi dan penguatan governan-ce

14.	Mewujudkan pemerintahan yang baik	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang berkelanjutan (43)	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur dengan pembelajaran organisasi (learning organization) kearah peningkatan kompetensi individual dan peningkatan kapasitas organisasional	Akselerasi repormasi birokrasi dan penguatan governance
		Terwujudnya Pengelolaan keuangan (pembiayaan, pendapatan dan belanja) dan aset daerah yang transparan, akuntabel dan inovatif dan tertib (44)	Mengefektifkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara seiring dengan pembelajaran yang efektif dan efisien berbasis pada inovasi administratif dan teknis	Akselerasi repormasi birokrasi dan penguatan governan-ce
		Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsil gender dan memperlihatkan kearifan lokal (45)	Meningkatkan kualitas proses politik, teknokratis, partisipatif, top down- botton up dalam pengarusutaman gender yang makin signifikan dan memperlihatkan penuh kearifan lokal	Akselerasi repormasi birokrasi dan penguatan governance
15.	Mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa	Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat	Peningkatan keswadayaan masyarakat berbasis kearifan lokal	Akselerasi repormasi birokrasi dan penguatan kemandirian desa

		Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemandirian masyarakat desa	Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kerangka otonomi desa	Akselerasi reformasi birokrasi dan penguatan kemandirian desa
--	--	---	---	---

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui RPJMD tahun 2016 – 2021 mengemban 7 misi. Berikut ini disajikan hubungan visi/misi dan tujuan/ sasaran pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2021:

Tabel 4.2.

Hubungan Visi/ Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

Visi : **“Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”**

NO	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi serta basis nilai utama dalam pembangunan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan	Memperkuat peran agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi serta nilai utama dalam penyelenggaraan pembangunan (T-1)	Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama (S-1)
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik melalui pendekatan aspiratif, partisipatif dan transparan	Memperkuat struktur dan budaya organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (T-2)	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel(S-2)
			Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien (S-3)
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S-4)
		Memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kesadaran hukum (T-3)	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masya-rakat (S-5)
		Sinkronisasi dan integrasi kebijakan di bidang transmigrasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (T-4)	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan transmigrasi local berdasarkan kebutuhan daerah (S-6)
		Meningkatkan kualitas pemerintahan desa	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan

NO	Misi	Tujuan	Sasaran
		(T-5)	pemerintahan desa (S-7)
3.	Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat	Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat (T-6)	Berkurangnya penduduk Miskin (S-8)
			Meningkatnya daya beli masyarakat (S-9)
			Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S-10)
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S-11)
			Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan (S-12)
		Meningkatkan peran pemuda dan membudayakan olahraga (T-7)	Meningkatnya kemandirian pemuda (S-13)
			Meningkatnya prestasi olah raga bagi pemuda dan masyarakat (S-14)
4.	Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi swasta di sektor perikanan, kelautan dan pariwisata	Meningkatkan kemampuan membuka isolasi daerah (T-8)	Meningkatnya aksesibilitas dari dan ke Selayar (S-15)
		Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar (T-9)	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar (S-16)
		Merevitalisasi kawasan dan obyek wisata (T-10)	Meningkatnya kinerja kepariwisataan daerah (S-17)

NO	Misi	Tujuan	Sasaran
		Meningkatkan keterintegrasian wilayah daratan dan pulau-pulau (T-11)	Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan (S-18)
		Meningkatkan daya saing dan investasi daerah (T-12)	Meningkatnya investasi (S-19)
			Terbangun dan berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata (S-20)
			Terbangun dan berkembangnya Kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budi daya ikan karang (S-21)
5.	Mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif daerah	Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis Wilayah dalam rangka optimisasi pemanfaatan Sumberdaya Kemaritiman (T-13)	Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa) (S-22)
			Terbangun dan berkembangnya Kawasan Industri Perkapalan Strategis Nasional (S-23)
			Ditetapkannya dan dikembangkannya SELAYAR sebagai salah satu Basis Utama Pertahanan Negara (S-24)
			Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan (S-25)
		Memelihara fungsi lingkungan hidup (T-14)	Terpeliharanya kelestarian sumberdaya alam

NO	Misi	Tujuan	Sasaran
			(S-26)
6.	Mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta sentra pertumbuhan di sektor agrobisnis dan agromaritim yang berbasis pada ekonomi kerakyatan	Meningkatkan keberdayaan tenaga kerja (T-15)	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja (S-27)
		Meningkatkan keberdayaan usaha ekonomi kerakyatan (T-16)	Meningkatnya daya saing dan produktivitas ekonomi kerakyatan(S-28)
7.	Mewujudkan pelestarian tradisi dan kearifan lokal melalui strategi kebudayaan	Memantapkan jati diri keselayaran (T-17)	Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Selayar (S-29)

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah dikelompokkan menjadi Program Unggulan dan Program Prioritas ditingkat OPD. Program unggulan merupakan program Bupati sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan disinkronkan dengan amanat/kebijakan nasional yang wajib dilaksanakan oleh daerah. Program unggulan harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan program prioritas ditingkat OPD berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan OPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.

Tabel 4.
Penjelasan Program Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		
				Kondisi Awal (2015)	2017	Kondisi Akhir (2021)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama	Program Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan	pelaksanaan ibadah	n.a	65	90
			Jumlah insiden dalam hubungan antar umat beragama	n.a	0	0
2	Peningkatan kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Keuangan dan Aset Daerah	Opini atas laporan keuangan	Disclaimer	WDP	WTP
3	Peningkatan kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Program Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja birokrasi	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	C	B	BB
			Skor evaluasi kinerja pemerintahan daerah (EKPD)	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
4	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,48%	85%	95%

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		
				Kondisi Awal (2015)	2017	Kondisi Akhir (2021)
1	2	3	4	5	6	7
5	Pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Memelihara kondisi ketentraman dan ketertiban yang kondusif	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten (%)	89,29	92,00	97,00
6	Peningkatan pelayanan penyelenggaraan transmigrasi local berdasarkan kebutuhan daerah	Program Pembangunan Ketransmigrasian	Transmigran lokal (KK)	na	20	20
7	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	% Desa Mandiri	1,2	4,9%	23,4
			%Desa Berkembang	7,4	28,39%	64,19
			%Desa Tertinggal	4,9%	9,88%	0
8	Pengurangan penduduk Miskin	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	Angka Kemiskinan	5,4	4,8	3,7
9	Peningkatan daya beli masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas	Income per kapita	19	24	30

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		
				Kondisi Awal (2015)	2017	Kondisi Akhir (2021)
1	2	3	4	5	6	7
		Penyelenggaraan Pendidikan	penduduk (juta)			
10	Peningkatan derajat pendidikan masyarakat	Program Peningkatan Keaksaraan	Angka Melek Huruf	93,98	96	100
		Program Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,98	12,32	12,62
11	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	67,50	67,54	67,59
12	Peningkatan kualitas keluarga, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender	Rasio Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	28,50	32,5	40
			Indeks Ketimpangan Gender	n.a	20	30
			Indeks pembangunan gender (IPG)	91,37	92,00	93,00
			Indeks pemberdayaan gender (IDG)	59,67	59,90	61,00
13	Peningkatan kemandirian pemuda	Program Peningkatan Kemandirian Pemuda	% pemuda mandiri	n.a	62,5	75
14	Peningkatan prestasi olah raga bagi pemuda dan masyarakat	Program Pembinaan Keolahragaan	Prestasi olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	3	7	15

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		
				Kondisi Awal (2015)	2017	Kondisi Akhir (2021)
1	2	3	4	5	6	7
			(cabang olahraga)			
15	Peningkatan aksesibilitas dari dan ke Selayar	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Jasa Perhubungan dan Transportas	Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi darat (%)	40	50	70
			Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut (%)	n.a	15	50
			Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara (%)	n.a	10	40
16	Peningkatan kapasitas infrastruktur dasar	Meningkatkan kapasitas infrastruktur perhubungan dan transportasi	Jalan Lingkar Timur Utara terbangun (%)	n.a.	Proses (15)	Proses (55)
			Jalan Lingkar Timur Tengah Terbangun (%)	n.a	Proses (15)	Proses (55)
			Jalan Lingkar Timur Selatan Terbangun (%)	n.a	Proses (15)	Proses (55)
			Tingkat pemenuhan jaringan jalan (%)	46,04	60.50	85
			Kapasitas Bandara Aroeppala (%)	20	27,5	35
			Kapasitas Bandara Kayuadi (%)	2,5	5	10
			Kapasitas Pelabuhan Laut (%)	20	32,5	42,5
			Kapasitas Terminal Angkutan Barang dan	20	32,5	42,5

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		
				Kondisi Awal (2015)	2017	Kondisi Akhir (2021)
1	2	3	4	5	6	7
			Penumpang (%)			
		Program Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Air dan Irigasi	Rasio jaringan irigasi	41,35	45	70
			Rasio ketersediaan air baku	n.a	60	100
		Program Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rasio Rumah layak Huni (%)	10	20	40
			Cakupan Sanitasi Layak (%)	60,06	65	100
			Kawasan Pemukiman Kumuh tertangani (%)	n.a	40	100
			Rasio Ketersediaan Air Bersih (%)			
			- Rumah Tangga (%)	54,07	57	62,05
			- Industri (%)	n.a	100	100
			Rasio Elektrifikasi (%)			
			- Rumah tangga (%)	25	40	100
			- Industri	25	100	100
			PLTMG Terbangun dan Beroperasi	-	Terbangun	Beroperasi
			Ketersediaan Energi Listrik pada KEK Pariwisata (MW)	-	Terbangun	
			Ketersediaan Energi Listrik pada Kawasan Pariwisata Pulau Gusung		Proses	

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		
				Kondisi Awal (2015)	2017	Kondisi Akhir (2021)
1	2	3	4	5	6	7
			(MW)			
			Ketersediaan Energi Listrik pada Kawasan Industri Perikanan Terpadu (MW)			
			Ketersediaan Energi Listrik pada Kawasan Pelabuhan Logistik (MW)			
			Terminal Gas Terbangun dan Beroperasi	n.a		Beroperasi
17	Peningkatan kinerja kepariwisataan daerah	Program Pembangunan Kepariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Domestik 5,946 Asing 253	7,195 10% 306 10%	10,536 10% 449 10%
18	Peningkatan kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan	Program Peningkatan Layanan Jasa Perhubungan dan Transportas	Tingkat kelancaran Barang dan Penumpang dari dan ke wilayah kepulauan (%)	35	45	80,15
19.	Peningkatan investasi	Program Peningkatan Investasi Daerah	Nilai PMDN (milyar rupiah)	35	1,036	4,039
			Nilai PMA (\$)	5000	10.000	30.000
20	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata	Program Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor	Penetapan KEK Pariwisata	Proses	Ditetapkan	Ditetapkan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		
				Kondisi Awal (2015)	2017	Kondisi Akhir (2021)
1	2	3	4	5	6	7
		Program Peningkatan Dukungan Terhadap KEK Pariwisata	Realisasi Pembangunan KEK Pariwisata (%)	-	10	40
		Program Peningkatan Koordinasi dan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Realisasi Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (%)	n.a	45	65
21	Pengembangan kawasan distribusi logistik (barang dan jasa)	Program Peningkatan Koordinasi dan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Realisasi Pembangunan Kawasan Distribusi Logistik (%)	n.a	5	25
22	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Perkapalan Strategis Nasional	Program Pembangunan Kawasan Industri Perkapalan Strategis Nasional	Realisasi Pembangunan Kawasan Industri Perkapalan Strategis Nasional (%)	n.a	5	25
23	Penetapan dan Pengembangan SELAYAR sebagai salah satu Basis Utama Pertahanan Negara	Program Penguatan Kapasitas Daerah	Kabupaten Kepulauan Selayar Menjadi Basis Utama Pertahanan Negara	n.a	Memperoleh persetujuan	Memperoleh persetujuan
24	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, serta perikanan dan kelautan (S-25)	Program Revolusi Tani	Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Padi 29,617	32,953	38,730
				Jagung 9,035	9,939	11,747
			% Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Holtikultura	J.Kepron 5,850.40	5,890,14	5,870.27
			% Peningkatan Produksi	Kelapa	25,951.74	27,544.21

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		
				Kondisi Awal (2015)	2017	Kondisi Akhir (2021)
1	2	3	4	5	6	7
			Perkebunan	25,190.37	1,5%	1,5%
				Pala 292,88	301,70 3%	349,68 3%
				Cengkeh 125,50	133,13 3%	149,82 3%
				Jambu Mete 1,400.00	1,543.50 5%	1,876.61 5%
			Tingkat Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan	Padi 59,05	62,05	67,02
				Jagung 45,95	47,00	50,01
			Tingkat Produktivitas Pertanian Tanaman Holtikultura (ton/ha)	J.Kepron 100,96	103,05	106,75
			Tingkat Produktivitas Tanaman Perkebunan	Kelapa 1,502	1,502	1,502
				Pala 316	316	316
				Cengkeh 162	170	191
				Jambu Mete 400	441	517
		Program Pembangunan dan Pengembangan Sentra Usaha Pernakan	Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi Pusat Pemurnian Sapi Bali	n.a	50	100
			Realisasi pengembangan Pulau Kalao menjadi Tempat Pembiakan Ternak Unggul	n.a	20	100
			% Peningkatan Produksi Ternak	Sapi ptg 16,756	18,542 5,23%	22,801 5,32%
				Sapi prh 0	0	0

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		
				Kondisi Awal (2015)	2017	Kondisi Akhir (2021)
1	2	3	4	5	6	7
					0	0
				Kerbau 4,588	4,740 1,65%	5,062 1,66%
				Kuda 3,766	3,948 2,39%	4,340 2,39%
				Kambing 80,831	82,197 0,84%	85,000 0,84%
				Domba 36	56 24,44%	141 25,89%
				Ay.Brs 272,372	274,675 0,42%	279,339 0,42%
				Ay. Ras pdg 8,732	9,766 5,75%	12,215 5,75%
				Ay.Ras Ptlr 11,613	12,962 5,65%	14,816 5,65%
				Itik 5,691	6,536 7,16%	8,620 7,16%
		Program Peningkatan Produksi Perikanan dan kelautan	% Peningkatan Produksi Perikanan dan kelautan	10,11	0,12	52,91
		Program Pengembangan Hutan Rakyat	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,10	20,02%	0,20
25	Pemeliharaan fungsi lingkungan hidup	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Lingkungan Hidup	78,08	78,3	79,05
26	Peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Program Peningkatan Layanan Ketenagakerjaan	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	0,06	0,25	1
27	Peningkatan daya saing dan produktivitas ekonomi kerakyatan	Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Skor daya saing ekonomi kerakyatan	n.a.	3	7

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		
				Kondisi Awal (2015)	2017	Kondisi Akhir (2021)
1	2	3	4	5	6	7
28	Peningkatan kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Selayar	Program Pembangunan Kebudayaan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	n.a	2	2
			Jumlah nilai budaya yang dilestarikan	n.a	6	6
			Jumlah nilai kearifan lokal yang dilestarikan dan dikembangkan	n.a	16	16

4.2.1. Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD Dan Validasi Kabupaten Kepulauan Selayar

Terhadap Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Dalam Penyusunan dan Penganggaran APBD Tahun 2017 harus mengakomodir Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, serta mengakomodir 14 point yang termuat dalam Kontrak Politik Bupati dan Wakil Bupati dengan masyarakat Kepulauan Selayar sebagaimana berikut:

- Gratis Pakaian Sekolah, Sepatu, Tas, Alat Tulis dan bantuan biaya bagi tamatan SMA yang ingin memasuki Perguruan Tinggi
- Gratis Pengurusan KK, KTP, dan Akta Kelahiran
- Gratis Raskin dan Bedah rumah 1000 unit/Tahun
- Gratis Operasi, Persalinan dan Pengangkatan Pasien ke Rumah Sakit Rujukan
- Gratis Jaminan Kecelakaan 10 Juta/KK
- Gratis Uang muka pemasangan listrik PLN dan air bersih PDAM
- Gratis Alat Perikanan, Pertanian dan Bibit Ternak Sapi 4 ekor/KK dan Kambing 10 ekor/KK
- Bantuan Modal Usaha Bagi UMKM 7,5 Juta/KK
- Bantuan pertukangan, perbengkelan dan jahit menjahit berdasarkan profesi
- Bantuan makan minum bagi penumpang kapal feri yang pelayarannya tertunda di pelabuhan Bira Bulukumba
- Tunjangan hidup bagi anggota masyarakat yang cacat fisik, mental, orang tua jompo dan yatim piatu
- Tunjangan kematian dan ta'ziah
- Tunjangan haji/Umroh bagi guru dan PNS lainnya yang berprestasi
- Menyangga Harga Komoditas andalan (Kopra, Pala, Cengkeh, Jambu mente, dan lain – lain)

2. Memprioritaskan Program/kegiatan yang sudah dianggarkan tahun sebelumnya yang belum terlaksana/terrealisasi untuk diprioritaskan pada tahun anggaran 2017, sebagai salah satu contoh yang belum terlaksana adalah : Pembangunan jalan lingkar di Seluruh kecamatan daratan maupun kecamatan kepulauan

3. Program Pembangunan Daerah di Bidang Pemerintahan

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan efektif (Good Government) demi kepentingan masyarakat banyak, maka Pemerintah Daerah akan melaksanakan beberapa program/kegiatan diantaranya sebagai berikut :

- ❖ Pelaksanaan Program pelatihan dan evaluasi bagi seluruh aparatur Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan SDM PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
- ❖ Sinkronisasi program Bupati terpilih dengan para Camat, Lurah, dan Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar
- ❖ Sosialisasi secara menyeluruh kepada semua masyarakat, para Kepala Desa, Perangkat Desa dan lembaga-lembaga terkait perihal Peraturan Daerah (PERDA) terbaru Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pemerintahan Desa
- ❖ Sosialisasi penggunaan dan alokasi Dana Desa kepada semua Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar, agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Program Pembangunan Daerah Bidang ekonomi

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat penting dalam rangka mewujudkan **Kemandirian Daerah** dan Peningkatan **Daya Saing Daerah**. Untuk itu kepada Pemerintah Daerah diharapkan memperhatikan beberapa Pelaksanaan Program yaitu :

a. Kelautan Perikanan

Perlunya pengelolaan perikanan yang mewujudkan kesejahteraan nelayan dan peningkatan daya saing hasil pengelolaan perikanan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan program terpadu antara lain :

- Peningkatan keterampilan nelayan
- Perbaikan Teknologi usaha penangkapan ikan
- Perluasan jaringan informasi dan akses pasar
- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dari hulu sampai hilir
- Program Budidaya Perikanan dari Hulu Sampai Hilir
- Program pengadaan mesin diesel bagi nelayan
- Program pengadaan mesin katinting
- Program pengadaan sampan fiber dan perahu joloro

- Program pengadaan bagang bagi nelayan
- Pelatihan manajemen dan penungkatan skill pengelolaan hasil perikanan
- Program Pembangunan Rumah Di Tengah Taka (Huma) tempat persinggahan sementara bagi semua nelayan, ketika cuaca kurang bersahabat di semua titik – titik pencarian ikan.

b. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program ini senantiasa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan kemandirian pangan dengan indikator yang jelas, dan program yang perlu dilakukan dan ditingkatkan pemerintah adalah sebagai berikut:

- Program peningkatan hasil produksi pertanian;
- Program peningkatan kesejahteraan petani;
- Ketersediaan bibit, pupuk bagi petani;
- Aksesibilitas penjualan hasil produk pertanian;
- Program peningkatan hasil perkebunan;
- Program peningkatan penerapan teknologi peternakan, pertanian dan perkebunan;
- Program peningkatan hasil pemasaran pertanian, peternakan dan perkebunan;
- Diversifikasi pertanian;
- Program pengadaan jaring pengaman kebun;
- Program pengadaan kawat berduri
- Program pengadaan hand tractor
- Program pengadaan alat panen (musim panen)
- Program pelatihan dan peningkatan kemampuan petani yang terus berkelanjutan

c. Perindustrian dan perdagangan

Pemerintah daerah menggalakkan industri skala rumah tangga dalam mendorong kemandirian warga dan daya saing daerah. Program yang dapat dilaksanakan adalah:

- Pengembangan usaha rumah tangga (usaha rumahan)
- Pengembangan industri kreatif yang bernilai jual
- Pengembangan sentra industri potensial seperti industri hasil pertanian

- Program pengembangan industri kecil dan menengah khususnya industri kopra dan lainnya
- Pengembangan sentra-sentra industri potensial, seperti industri galangan kapal skala menengah di wilayah pulau
- Pengembangan industri kreatif dan peningkatan kapasitas usaha dan manajemen
- Stabilitas harga hasil bumi, seperti harga: kopra, pala, cengkeh, jambu dan lain-lain
- Program pembangunan lokasi pasar baru, dan pengembangan pasar yang sudah ada diseluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam rangka mendukung kegiatan perdagangan dan kegiatan perekonomian masyarakat setempat

5. Program Kegiatan Pengembangan Wilayah atau Bidang Infrastruktur.

Pengembangan infrastruktur yang dilakukan pemerintah hendaknya mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program yang dapat dilaksanakan dan perlu terus ditingkatkan adalah:

a. Pekerjaan Umum

1. Pemerataan pengembangan di setiap desa
2. Perbaikan jalan yang rusak sebagai akses mobilisasi perekonomian
3. Akses dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat pada musim kemarau
4. Akses dan ketersediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat
5. Program Pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh
6. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
7. Program Pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, dan jaringan irigasi lainnya
8. Program pengembangan drainase, turap/talud/bronjong
9. Pembangunan jalan lingkar diseluruh Kecamatan, baik daratan maupun Kecamatan Kepulauan
10. Pengembangan perkerasan jalan, baik jalan baru maupun jalan lama harus menggunakan semen (dicor), terutama pembangunan jalan yang ada di Kecamatan Kepulauan
11. Pembangunan dan perluasan jaringan listrik PLN pada daerah-daerah yang belum terjangkau listrik PLN, terutama di pulau-pulau
12. Program pengadaan alat atau sarana telekomunikasi (jaringan) di Kecamatan Kepulauan yang belum memiliki jaringan komunikasi
13. Pengembangan perpipaan jaringan air bersih di Kecamatan kepulauan
14. Program pembuatan sumur tanah dangkal dan sumur bor
15. Program pengadaan jambang keluarga disemua kecamatan, khususnya di Kecamatan Kepulauan

b. Perumahan

Program ini diarahkan pada program lingkungan sehat perumahan dan pengadaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.

c. Perhubungan

- Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan disemua jasa angkutan meliputi darat, laut, dan udara guna peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana perhubungan.
- Pemerataan pembangunan jembatan/dermaga perahu kayu/Joloro di seluruh Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar, guna mendukung aktifitas bongkar muat hasil laut, dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat belayan setempat.

6. Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan

Bahwa pengembangan dibidang pendidikan harus menitik beratkan pada kurikulum pendidikan yang berkualitas guna menciptakan anak didik yang mampu bersaing diluar daerah. Kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain:

a. Pendidikan

1. Pengembangan pendidikan anak usia dini
2. Peningkatan kualitas guru (tenaga pendidik)
3. Perbaikan sarana dan prasarana sekolah guna menunjang mutu pendidikan.
4. Peningkatan pelayanan pendidikan seperti pangadaan pelajaran, rehabilitasi gedung sekolah. Pembangunan SLTP dan SLTA pada daerah-daerah terpencil, pembangunan dan perbaikan sarana olah raga, pengadaan mobilier sekolah, pembangunan Gedung TK dan pembangunan alat permainan anak usia dini (APE) luar dan dalam, pembangunan gedung TPA
5. Program Pembinaan akhlak mulia
6. Program peningkatan mutu peserta didik
7. Program peningkatan mutu dan penyebaran pendidik
8. Pembangunan pagar sekolah-sekolah negeri maupun swasta
9. Program pengadaan buku pelajaran/buku paket mulai dari tingkatan SD s/d tingkatkan SLTA
10. Pemerataan penyebaran tenaga pendidik di setiap sekolah-sekolah negeri maupun di sekolah-sekolah swasta
11. Program monitoring dan evaluasi secara berkala dalam menyukkseskan program-program

b. Pemuda

Program sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan program peningkatan sarana dan prasarana olahraga bagi generasi muda Kabupaten Kepulauan Selayar

7. Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan

Program bidang kesehatan ini sangat strategis, menyangkut kesehatan dan keluarga berencana. Ada pepatah mengatakan didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah kiranya perlu meningkatkan pelaksanaan program antara lain:

a. Kesehatan

1. Peningkatan angka harapan hidup
2. Penurunan tingkat kematian ibu dan bayi
3. Penurunan jumlah penyakit menular
4. Peningkatan status puskesmas
5. Pengadaan air bersih dan sanitasi
6. Pembangunan Posyandu Lansia
7. Pembangunan Gedung rawat Polindes
8. Rehabilitasi gedung Puskesmas
9. Pembangunan poskesdes
10. Pemagaran Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dan Posyandu
11. Pembangunan Rujukan Khusus di Kepulauan
12. Pembangunan jambang keluarga dan MCK
13. Penambahan tenaga medis termasuk dokter ahli
14. Pengadaan kapal laut ambulance
15. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
16. Program perbaikan gizi masyarakat
17. Program kesehatan ibu melahirkan
18. Program pelayanan kesehatan masyarakat miskin
19. Program promosi pentingnya menjaga kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
20. Sosialisasi program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
21. Sosialisasi dan sinkronisasi program BPJS dengan pelayanan rumah sakit daerah secara menyeluruh pada semua masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar
22. Peningkatan fasilitas dan alat yang ada dirumah sakit daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
23. Setiap puskesmas yang ada diseluruh Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar, baik daratan maupun kepulauan harus dilengkapi dengan dokter umum, dan jika dimungkinkan maka dilengkapi dengan dokter spesialis.

b. Keluarga Berencana

1. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV / AIDAS;
2. Program keluarga berencana.

8. Program Di Bidang Pariwisata Dan Budaya

Perlunya upaya terstruktur dan terorganisir dalam upaya peningkatan pariwisata di daerah. Hal ini dimaksudkan agar betul – betul pariwisata daerah membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan disini lain keaslian budaya local bisa terjaga. Adapun program yang akan dilakukan antara lain:

a. Pariwisata

1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata daerah
2. Pengembangan jaringan kerjasam promosi wisata
3. Pengembangan statistic kepariwisataan
4. Pelatihan pemandu wisata terpadu
5. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
6. Program distiminasi pariwisata
7. Program pengembangan kemitraan pariwisata.

b. Kebudayaan

1. Program pengembangan nilai budaya
 - Pelestarian dan aktualisasi adat budaya – budaya daerah
 - Penyusunan kebijakan tentang budaya local daerah
2. Program pengelolaan kekayaan budaya daerah
 - Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya daerah
 - Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah.

9. Program Pengembangan Daerah Di Bidang Pelayanan Umum, Ketertiban Dan Ketentraman Umum.

a. Pelayanan umum

- Program penataan administrasi kependudukan
- Program peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan public
- Program penerangan jalan dan tempat umum di lingkungan kecamatan sampai pedesaan
- Perencanaan pembangunan hendaknya diarahkan pada program percepatan pembangunan ekonomi

b. Bidang ketertiban dan ketentraman umum

- Fasilitas penerapan dan penengakan peraturan perundang undangan
- Fasilitas upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang ketentraman dan ketertiban

c. Kesbangpol

- Pelaksanaan fasilitas dan media terhadap organisasi politik dan lembaga Negara atau pemerintah
- Pembinaan pengawasan terhadap organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan
- Pembinaan teknis dan penyelenggaraan kepada masyarakat dibidang pengembangan nilai nilai idiologi
- Peningkatan kapasitas apparatus kesbangpol di bidang system implementasi politik, kelembagaan politik dan partai politik.
- Menggalakkan program pencegahan terjadinya pencurian
- Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

d. Pemerintahan umum

Mendorong agar kiranya program ini diarahkan pada peningkatan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan aparat dan pelaksana pemerintah daerah

e. Pemberian masyarakat dan pemerintah daerah

Fraksi SBY mendorong agar program yang dilaksanakan dapat memberikan kemandirian ekonomi desa dan peningkatan kapasitas penduduk. Dan program yang dapat dilaksanakan dan terus ditingkatkan adalah :

1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
2. Program peningkatan lembaga ekonomi desa

10. Program Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Bencana

a. Lingkungan hidup

- Penataan, perencanaan dan penetapan kebijakan teknis pemanfaatan sumber daya wilayah darat dan pengelolaan lingkungan hidup
- Pelaksanaan pendataan dan penyediaan informasi lingkungan bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat
- Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pengembangan kemitraan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan lingkungan.
- Peningkatan program dalam hal pengelolaan persampahan, pengendalian dan pencemaran lingkungan serta perlindungan dan konservasi sumber daya alam

b. Kehutanan

- Peningkatan pelaksanaan program pemanfaatan sumber daya hutan
- Program rehabilitasi hutan dan lahan

c. Penanggulangan bencana

- Penyusunan data base kebencanaan dan daerah rawan bencana
- Program diklat pengembangan SDM disaster managemen
- Kegiatan simulasi bencana
- Program peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana saat pra bencana

11. Program Pembangunan Bidang Keagamaan

Bidang keagamaan :

- Pendidikan ahlak untuk usia dini
- Pembangunan TPA di setiap desa
- Peningkatan kualitas tenaga pendidik keagamaan.

Mendorong terpeliharanya kerukunan umat beragama dan saling toleransi antar umat beragama.

12. Program Pembangunan Bidang Perlindungan Social Dan Ketenaga Kerjaan

Dalam program ini diarahkan pada program pemberdayaan fakir miskin dan program pembinaan kelembagaan kesejahteraan social

13. Peningkatan Saran Dan Prsarana Umum, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian Dan Peternakan, Perhubungan, Kelautan Dan Perikanan, Usaha Kecil Dan Menengah, Social Budaya Dan Keagamaan, Kepariwisata Dan Keamanan.

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan RPJMD tahun 2016 – 2021 pemerintah diharapkan untuk menyelesaikan program – program yang belum terlaksana dan menghindari pelaksanaan program baru yang menggunakan dana besar. Selanjutnya perlu juga dipikirkan penganggaran pagu kewilayahan, sehingga kecamatan juga dapat membantu pagu sendiri sehingga kecamatan juga dapat disamakan SKPD.